

Sikap mahasiswa dan anggota DPRD Propinsi Kalimantan Tengah terhadap konsep otonomi daerah

Tia Rahmania, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20487454&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menetapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ketetapan ini membuat UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah digantikan dengan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara hadimya otonomi daerah yang lebih luas daripada sebelum ini, menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari yang bernada optimis sampai tanggapan-tanggapan pesimis akan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ini. Mengingat otonomi daerah sendiri sebagai suatu konsep yang berasal dari kebijakan publik yang dibuat dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak, maka dianggap penting dan menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana respon yang muncul dari individu-individu dalam masyarakat akibat diberlakukannya otonomi daerah.

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sikap mahasiswa dan anggota DPRD terhadap konsep Otonomi Daerah, khususnya di propinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu propinsi yang diperkirakan akan meraih kemajuan pesat (kompas, 6 November 2000). Menurut Morgan (1979) pemahaman terhadap sikap dipandang sebagai kunci untuk pemahaman dan kemampuan memperkirakan apa yang akan dilakukan individu.

Penelitian ini menggunakan alat berupa kuesioner dengan teknik Semantic Differential dari Osgood , Suci dan Tannenbaum (1957, dalam Snider & Osgood, 1977), berisi item-item kata sifat yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu: dimensi evaluasi, potensi, dan aktivitas. Proses face validity dilakukan terhadap alat dengan bantuan expert judgement, dan uji reliabilitas terhadap alat dilakukan dengan perhitungan Alpha Cronbach. Penggalan data dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik Focus Group Discussion untuk memperkaya analisis dan memperoleh gambaran dinamika tingkah laku.

Dari analisa dan interpretasi data diperoleh hasil bahwa ada perbedaan sikap yang signifikan antara mahasiswa dan anggota DPRD dalam memaknai konsep otonomi

daerati, dimana para anggota DPRD memiliki sikap yang cenderung lebih favorable dalam memaknai otonomi daerah dibanding responden mahasiswa.

Setelah didiskusikan ternyata dalam masing-masing kelompok responden sendiri terdapat penyebaran sikap yang sukar disebut timogen dalam memaknai konsep Otonomi Daerah yang mungkin disebabkan baik responden mahasiswa dan anggota DPRD memiliki sikap yang beragam terhadap makna dan interpretasi otonomi daerah. Selanjutnya, saran untuk perbaikan penelitian adalah memperbanyak jumlah responden penelitian dan mengukur sikap dengan metode lain, yang lebih menggunakan pendekatan the Message-learning Approach.

Akhirnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, agar melakukan bentuk sosialisasi yang tepat dan mengetahui masalah yang perlu disosialisasikan, juga memberikan masukan dan mendorong timbulnya ide-ide baru bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjut.